

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

1. PERKEMBANGAN INFLASI PROVINSI SULAWESI TENGGARA TRIWULAN I

1. Perkembangan tingkat inflasi provinsi tercermin dari Indeks Harga Konsumen (IHK). Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki 4 Kota IHK sebagai representasi tingkat inflasi provinsi, yakni Kota Kendari, Kota BauBau, Kabupaten Konawe, dan Kabupaten Kolaka.
2. Pada triwulan I 2024, inflasi gabungan di wilayah Sulawesi Tenggara tercatat mengalami inflasi tahun ke tahun sebesar 2,76% (yoy), menurun dibandingkan triwulan IV 2023 yang sebesar 2,86% (yoy). Secara bulanan, pada bulan Januari 2024 mengalami deflasi sebesar -0,03%, pada bulan Februari 2024 mengalami Inflasi sebesar 0,19%, dan pada bulan Maret 2024 mengalami inflasi sebesar 0.62%. Adapun perkembangan inflasi dapat dilihat pada BPS Sulawesi Tenggara mulai Januari 2024 hingga Maret 2024 sebagai berikut:

Januari 2024

- Pada Januari 2024, IHK Provinsi Sulawesi Tenggara mengalami deflasi 0,03% (mtm), berbalik arah dari inflasi 0,47% (mtm) di Desember 2023, dan lebih rendah dari inflasi nasional 0,04% (mtm). Deflasi ini lebih rendah dari rata-rata inflasi bulanan dua tahun terakhir sebesar 0,10% (mtm). Penurunan harga di Kelompok Transportasi, terutama tarif angkutan udara, serta Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga menjadi penyebab utama deflasi. Deflasi juga didorong oleh penurunan harga cabai rawit, daun kelor, dan cabai merah akibat pemulihan pasokan.
- Namun, Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau menahan deflasi dengan inflasi 0,58% (mtm) karena kenaikan harga tomat, sigaret kretek mesin, bawang merah, beras, dan kangkung. Kenaikan harga ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti peningkatan curah hujan, kenaikan cukai rokok, dampak El-Nino pada produksi beras, dan permintaan yang tinggi pada periode kampanye.
- Untuk Februari 2024, diperkirakan terjadi inflasi -0,17% (mtm) karena potensi kenaikan harga ikan segar, komoditas hortikultura, dan meningkatnya permintaan Faktor lain seperti kenaikan gaji PNS, pencairan bantuan sosial, dan kenaikan harga emas dunia juga diperkirakan mendorong inflasi. Namun, tren penurunan harga minyak dan avtur diperkirakan menahan inflasi.
- Prospek inflasi IHK 2024 diperkirakan meningkat namun masih dalam sasaran nasional $2,5\% \pm 1\%$. Inflasi tahunan Januari 2024 mencapai 2,32% (yoy), lebih rendah dari 2,58% (yoy) pada 2023. Pengendalian inflasi pangan dan berbagai upaya pengendalian oleh TPID diperkirakan akan membantu menurunkan inflasi. Upaya ini termasuk operasi pasar, kerja sama antar daerah, subsidi angkutan, gerakan tanam, dan optimalisasi produksi komoditas strategis.

TPID Sulawesi Tenggara akan terus memperkuat strategi 4K untuk mengendalikan inflasi melalui peningkatan produktivitas pangan, operasi pasar, perbaikan infrastruktur, dan koordinasi antar instansi.

INFLASI JANUARI 2024

No	Kota Inflasi/ Keterangan	Inflasi Bulan ke Bulan (MTM%)	Inflasi Tahun Kalender (YTD%)	Inflasi Tahun ke Tahun (YOY%)
1	Kota Kendari	-0,46%	-	1,92%
2	Kota Baubau	0,66%	-	3,88%
3	Kabupaten Konawe	0,31%	-	2,29%
4	Kabupaten Kolaka	0,16%	-	2,89%
5	Inflasi Gabungan 4 Kota IHK	-0.03%	-0,03%	2,46%
6	Nasional	0,04%	0,04%	2,57%

Andil Beberapa Jenis Komoditas Terhadap Inflasi/Deflasi Januari 2024

TOP 5 KOMODITAS PENYUMBANG INFLASI % MTM

TOMAT	SIGARET KRETEK MESIN	BAWANG MERAH	BERAS	KANGKUNG
0,20%	0,08%	0,07%	0,04%	0,03%

TOP 5 KOMODITAS PENYUMBANG DEFLASI % MTM

ANG, UDARA	CABAI RAWIT	DAUN KELOR	BAHAN BAKAR RT	CABAI MERAH
-0,23%	-0,12%	-0,03%	-0,03%	-0,03%

TOP 5 KOMODITAS PENYUMBANG INFLASI % YOY

BERAS	SIGARET KRETEK MESIN	CAWAI RAWIT	MOBIL	ANGK UDARA
0,87%	0,32%	0,16%	0,13%	0,12%

TOP 5 KOMODITAS PENYUMBANG DEFLASII % YOY

IKAN KEMBUNG	IKAN BANDENG	IKAN LAYANG	IKAN TERI	TELEPON SELULER
-0,11%	-0,10%	-0,06%	-0,05%	-0,04%

Februari 2024

- Pada Februari 2024, Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Sulawesi Tenggara
-

mengalami inflasi sebesar 0,19% (mtm), berbalik dari deflasi 0,03% (mtm) pada Januari 2024, namun lebih rendah dari inflasi nasional 0,37% (mtm). Inflasi ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata inflasi bulanan selama dua tahun terakhir yang sebesar -0,20% (mtm).

- Inflasi Februari 2024 didorong oleh Kelompok Makanan dan Minuman yang mencatat inflasi 0,37% (mtm) dengan kontribusi 0,14% (mtm), lebih rendah dari Februari 2023 yang mencapai 0,58% (mtm). Faktor utama adalah kenaikan harga beras, sigaret kretek mesin, dan sawi hijau. Kenaikan harga beras disebabkan oleh produksi yang menurun akibat dampak El-Nino di akhir 2023. Kenaikan harga sigaret kretek mesin diakibatkan oleh kenaikan cukai rokok 2024 sebesar 10%.
- Kelompok Kesehatan juga mencatat inflasi 1,95% (mtm) dengan kontribusi 0,05% (mtm), meningkat dari Januari 2024 yang sebesar 0,20% (mtm). Ini terutama disebabkan oleh kenaikan tarif dokter umum akibat pengenaan tarif retribusi pelayanan kesehatan di Kabupaten Konawe.
- Namun, inflasi tertahan oleh deflasi pada Kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan sebesar 0,49% (mtm) dengan kontribusi -0,04% (mtm). Deflasi ini disebabkan oleh penurunan harga telepon seluler serta beberapa komoditas pada Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau seperti cabai rawit dan tomat.
- Untuk Maret 2024, inflasi Sulawesi Tenggara diperkirakan berada di kisaran 0,45% hingga 0,85% (mtm). Inflasi diperkirakan didorong oleh kenaikan harga ikan segar akibat anomali cuaca dan peningkatan permintaan selama Ramadhan. Kenaikan gaji PNS dan THR sebelum Idul Fitri juga diperkirakan akan mendorong inflasi, bersama dengan kenaikan harga emas dan minyak global. Namun, panen beras nasional yang dimulai pada Maret 2024 diharapkan dapat menahan inflasi lebih tinggi.
- Inflasi tahunan Februari 2024 mencapai 2,90% (yoy), meningkat dari 2,58% (yoy) pada Januari 2024, namun masih dalam target nasional $2,5 \pm 1\%$. Inflasi tahunan ini didukung oleh terkendalinya inflasi pangan dan peningkatan produksi komoditas strategis seperti padi. Upaya pengendalian inflasi oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sulawesi Tenggara, termasuk operasi pasar, kerjasama antar daerah, dan program gerakan tanam, turut mendukung stabilitas harga.
- Prospek inflasi IHK 2024 diperkirakan menurun dari tahun sebelumnya, namun masih dalam sasaran inflasi nasional. TPID akan melanjutkan upaya *extra effort* melalui penguatan implementasi strategi 4K (Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif) untuk menjaga stabilitas harga dan menahan laju inflasi di masa

INFLASI FEBRUARI 2024

No	Kota Inflasi/ Keterangan	Inflasi Bulan ke Bulan (MTM%)	Inflasi Tahun Kalender (YTD%)	Inflasi Tahun ke Tahun (YOY%)
1	Kota Kendari	0,03%	-0,43%	2,27%
2	Kota Baubau	-0,34%	0,32%	3,58%
3	Kabupaten Konawe	0,80%	1,11%	4,10%
4	Kabupaten Kolaka	0,40%	0,56%	2,79%
5	Inflasi Gabungan 4 Kota IHK	0,19%	0,16%	2,90%
6	Nasional	0,37%	0,41%	2,75%

Andil Beberapa Jenis Komoditas Terhadap Inflasi/Deflasi

TOP 5 KOMODITAS PENYUMBANG INFLASI % MTM

BERAS	SIGARET KRETEK MESIN	TARIF DOKTER UMUM	SAWI HIJAU	IKAN CEKALANG
0,29 %	0,06%	0,05%	0,04%	0,03%

TOP 5 KOMODITAS PENYUMBANG DEFLASI % MTM

IKAN KEMBUNG	IKAN SELAR	TELEPON SELULER	TOMAT	CABAI RAWIT
-0,03%	-003%	-0.03%	-0,04%	-0,14%

TOP 5 KOMODITAS PENYUMBANG INFLASI % YOY

BERAS	SIGARET KRETEK MESIN	ANG. UDARA	MOBIL	TOMAT
1,17%	0,37%	0,14%	0,13%	0,11%

TOP 5 KOMODITAS PENYUMBANG DEFLASII % YOY

IKAN KEMBUNG	TELEPON SELULER	IKAN BANDENG	IKAN TERI	MINYAK GOREN
0,12%	-0,07%	-0,06%	-0,06%	-0,05%

Maret 2024

- Pada Maret 2024, IHK Sulawesi Tenggara mengalami inflasi sebesar 0,62% (mtm), lebih tinggi dibandingkan Februari 2024 (0,19%) dan inflasi nasional (0,52%). Inflasi ini juga melampaui rata-rata inflasi bulanan dua tahun terakhir sebesar 0,34%. Kenaikan tersebut dipicu oleh kelompok Makanan dan Minuman yang mencatat inflasi 2,08% (mtm) dan andil 0,64%, lebih tinggi dari Februari 2024 (0,37% dan andil 0,11%). Faktor utama kenaikan adalah harga beras, telur ayam ras, kangkung, dan Sigaret Kretek Mesin, dengan andil masing-masing 0,65%, 0,09%, 0,05%, dan 0,03%. Harga beras naik karena produksi turun akibat El-Nino, sementara telur ayam naik karena harga jagung pakan yang meningkat dan permintaan. Kenaikan harga kangkung disebabkan produksi rendah akibat curah hujan tinggi, dan Sigaret Kretek Mesin naik karena cukai rokok 2024 sebesar 10%.
- Kelompok Transportasi juga mengalami inflasi 0,30% (mtm) dengan andil 0,05%, naik dari Februari 2024 (0,08% dan andil 0,01%), terutama karena tarif angkutan udara yang meningkat menjelang HBKN dan harga avtur yang naik 2,8%. Sementara itu, Kelompok Kesehatan mengalami deflasi 1,80% (mtm) dengan andil -0,05%, berlawanan dari Februari 2024 yang mengalami inflasi 1,95% (mtm) dan andil 0,05%. Penurunan ini disebabkan tarif dokter umum yang turun seiring penundaan kebijakan kenaikan tarif di Konawe.
- Pada April 2024, inflasi diperkirakan berada dalam kisaran 0,15%-0,55% (mtm), dipengaruhi oleh potensi kenaikan harga ikan segar pasca HBKN Idul Fitri, terbatasnya akses kebutuhan pokok akibat toko-toko tutup, dan curah hujan tinggi yang mempengaruhi produksi sayuran. Gaji ke-13 dan THR Idul Fitri diperkirakan meningkatkan daya beli, sementara tren kenaikan harga emas dunia dan harga minyak global menambah tekanan inflasi.
- Meskipun ada berbagai tekanan, panen raya beras di Sultra pada April 2024 diharapkan dapat menahan inflasi lebih tinggi. Tingkat inflasi tahunan Maret 2024 mencapai 2,93% (yoy), sedikit meningkat dari Februari 2024 (2,90%) namun masih dalam sasaran inflasi nasional $2,5\% \pm 1\%$.
- Untuk mengendalikan inflasi, TPID Sulawesi Tenggara dan mitra strategis

melakukan berbagai upaya ekstra seperti operasi pasar, kerjasama antar daerah, pemberian subsidi angkutan, dan gerakan tanam di berbagai Program strategis lainnya mencakup penyediaan lahan dan fasilitas tanam oleh TNI, pengembangan koperasi, optimalisasi Perumda, dan aplikasi monitoring harga. Koordinasi antarlembaga dan upaya komunikasi yang efektif juga diharapkan dapat menahan laju inflasi lebih tinggi.

- Tekanan inflasi diperkirakan menurun pada 2024, didukung oleh peningkatan produksi pangan, perbaikan jumlah penerbangan, dan gerakan nasional pengendalian inflasi pangan. Kebijakan BI Rate pada 6% juga membantu menyesuaikan ekspektasi inflasi. Sesuai roadmap, TPID Sulawesi Tenggara akan melanjutkan strategi penguatan 4K melalui peningkatan produktivitas pangan, operasi pasar, perbaikan infrastruktur, dan koordinasi yang baik

INFLASI MARET 2024

No	Kota Inflasi/ Keterangan	Inflasi Bulan ke Bulan (MTM%)	Inflasi Tahun Kalender (YTD%)	Inflasi Tahun ke Tahun (YOY%)
1	Kota Kendari	0,87%	0,44%	2,67%
2	Kota Baubau	-0,37%	-0,05%	2,89%
3	Kabupaten Konawe	0,78%	1,90%	4,30%
4	Kabupaten Kolaka	0,65%	1,22%	2,34%
5	Inflasi Gabungan 4 Kota IHK	0,62%	0,79%	2,93%
6	Nasional	0,52%	0,93%	3,05%

Andil Beberapa Jenis Komoditas Terhadap Inflasi/Deflasi

TOP 5 KOMODITAS PENYUMBANG INFLASI % MTM

BERAS	TELUR AYAM RAS	KANGKUNG	EMAS PERHIASAN	SIGARET KRETEK MESIN
0,65%	0,09%	0,05%	0,03%	0,03%

TOP 5 KOMODITAS PENYUMBANG DEFLASI % MTM

TOMAT	IKAN LAYANG	IKAN SELAR	TARIF DOKTER	IKAN CAKALANG
-0,17%	-0,07%	-0,06%	-0,05%	-0,03%

TOP 5 KOMODITAS PENYUMBANG INFLASI % YOY

BERAS	SIGARET KRETEK MESIN	TOMAT	SAWI HIJAU	MOBIL
--------------	-----------------------------	--------------	-------------------	--------------

0,91%	0,40%	0,19%	0,17%	0,11%
TOP 5 KOMODITAS PENYUMBANG DEFLASII % YOY				
IKAN KEMBUNG	TELEPON SELULER	MINYAK GORENG	IKAN BANDENG	IKAN TERI
-0,10%	-0,07%	-0,05%	-0,05%	-0,04%

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

I. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PENGENDALIAN INFLASI DI SULAWESI TENGGARA

1. Prospek inflasi IHK pada tahun 2024 diperkirakan menurun dibanding tahun sebelumnya, namun masih berada di sekitar sasaran inflasi nasional $2,5\% \pm 1\%$ (yoy). Penurunan ini terutama disebabkan oleh perlambatan inflasi *volatile food* (VF) karena membaiknya kondisi iklim dan berfungsinya bendungan serta greenhouse untuk pembibitan. Peningkatan produksi ikan segar juga diperkirakan menahan inflasi VF di Sulawesi Tenggara.
2. Risiko inflasi dari *core inflation* dan *administered price* akibat kondisi perekonomian global masih perlu diwaspadai, termasuk dampak dari instabilitas geopolitik yang dapat mempengaruhi *supply chain global* dan harga komoditas dalam negeri. Penguatan nilai tukar mata uang negara maju seperti Amerika Serikat juga berisiko melemahkan Rupiah dan mendorong *imported inflation*.

Pada tahun 2024, dua kota tambahan, Kabupaten Kolaka dan Kabupaten Konawe,

3. akan dimasukkan dalam perhitungan IHK. Pemerintah daerah perlu fokus pada pengendalian inflasi di daerah ini melalui sinergi dan perencanaan yang baik untuk memastikan ketersediaan pasokan dan menjaga ekspektasi inflasi masyarakat.
 4. TPID di Sulawesi Tenggara bersama mitra strategis terus melakukan berbagai upaya pengendalian inflasi melalui operasi pasar, perluasan Kerja Sama Antar Daerah (KAD), pemberian subsidi angkutan, dan berbagai program peningkatan produksi. Upaya komunikasi juga dilakukan untuk menahan laju inflasi yang lebih
 5. Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan BI7DRR pada 6,00% untuk penguatan stabilisasi nilai tukar Rupiah dan memastikan inflasi tetap terkendali dalam sasaran $2,5 \pm 1\%$ pada 2024. Langkah-langkah lainnya mencakup stabilisasi nilai tukar, penguatan strategi operasi moneter, dan transparansi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di tengah kondisi geopolitik global dan ketidakpastian ekonomi.
3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

I. PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN INFLASI (4K) DI SULAWESI TENGGARA

K1. Keterjangkauan Harga

1. Pelaksanaan pasar murah bersama BULOG (Program SPHP) di berbagai wilayah, baik Kota Kendari, Kab. Bombana, Kab. Muna Barat, Kab. Konawe Utara, dan lainnya pada Februari 2024.
2. Pelaksanaan pasar murah rutin oleh 4 TPID Kota/Kabupaten IHK pada periode bulan Januari
3. Pasar Murah oleh Dinas Ketahanan Pangan Sulawesi Tenggara di Kab Buton dan Buton Utara
4. Pasar Murah oleh TPID 17 Kabupaten Non-IHK di antaranya Bombana, Muna, dan Buton
5. Gerakan Pangan Murah Keliling (GAUL) Bombana Komoditas Pangan
6. Lanjutan skema kios pantau dan penyeimbang di Sulawesi Tenggara di antaranya: Lapak Inflasi Daerah (Laida) oleh Kota Baubau di Pasar Survei BPS, Kios Pengendalian Inflasi (KOPI) Bombana, dan Warung Tekan Inflasi (Wartek Inflasi) Kolaka Utara
7. Sidak pasar rutin dan insidental untuk mengantisipasi kenaikan harga

K2. Ketersediaan Pasokan

1. Program Gerakan Tanam di Kota Baubau dan Kota Kendari, Muna Barat, Koltim, Bombana, Konsel, Muna dan Konut dengan komoditas cabai dan bawang merah.
2. Panen lanjutan program Tanimas yaitu penanaman 2,7jt bibit horti di SMA & SMK se-Sultra.

Pemanfaatan lahan pekarangan terpadu untuk sayuran oleh Kab. Buton Tengah

3. dan Kabupaten Bombana
4. Gerakan Pemanfaatan lahan pekarangan dengan menanam bibit jagung, cabai, dan tomat di Kantor BPBD Sulawesi Tenggara
5. Penanaman Tomat 1500 pohon, cabai rawit 1000 pohon, cabai keriting 5200 pohon di Kolaka Timur
6. Program pemanfaatan kebun pekarangan hidroponik dan tanam padi disela sawit dan inovasi jagung di Konawe Utara
7. Penyaluran bantuan cadangan beras pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara dengan jumlah bantuan beras sebesar 1.316,52 ton kepada total 219.400 keluarga penerima manfaat dengan penerimaan sebesar 10kg/bulan hingga 6 bulan ke depan.
8. Penambahan RMU di Kelurahan Labunia Muna.

K3. Kelancaran Distribusi

1. 2 KAD dan penjajakan 3 KAD baru hingga Maret 2024 intra dan inter provinsi (realisasi KAD) Bombana dengan Bantaeng dan Sidrap dengan komoditas telur dan hortikultura, (Penjajakan) Kendari dengan Buton Selatan dan Pinrang dengan komoditas Ikan Kembung dan Sayuran serta Muna dan Kolaka Timur untuk komoditas beras.
2. Pengawasan distribusi logistik untuk penyaluran komoditas strategis oleh Satgas Pangan dan Babinsa di lingkungan Korem Haluoleo.
3. Penambahan titik bongkar sayuran di Kendari dari 1 ke 5

K4. Komunikasi Efektif

1. HLM Rakorda TPID se Sultra menjelang Ramadhan oleh TPID Provinsi 8 Maret 2024 yang dipimpin oleh PJ Gubernur dan dihadiri oleh seluruh Kota/Kabupaten
2. HLM Kota/Kabupaten di Kendari pada 6 Maret dan Muna pada 7 Maret 2024 persiapan menjelang Ramadhan dan HBKN Idul Fitri.
3. Rilis himbauan inflasi rutin oleh PJ Gubernur dengan *update* kondisi pasokan dan harga komoditas strategis melalui media sosial maupun kanal berita
4. Forum Kominda membahas risiko inflasi ke depan dan antisipasi berita *clickbait* dan *hoax* pada 6 Maret 2024
5. *Capacity Building* TPID Provinsi dan Kabupaten/Kota IHK pada 18 Maret 2024 membahas mengenai optimalisasi pasar murah.
6. Rapat Mingguan Koordinasi TPID masing-masing Kota/Kab
7. Musrembang di berbagai daerah dan pembahasan RPMJ Bersama pemerintah provinsi dengan salah satu topik pengendalian inflasi Bersama BI
8. Musrembangtan Sulawesi Tenggara, membahas mengenai Upaya mendorong peningkatan potensi pertanian Sulawesi Tenggara dan upaya-upaya yang telah dan akan dilakukan untuk antisipasi penurunan produksi pertanian baik akibat perubahan iklim maupun factor lainnya.

Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

I. EVALUASI KEBIJAKAN

1. Perlu adanya inovasi kebijakan yang diperluas guna menjaga daya beli masyarakat di tengah potensi kenaikan harga komoditas.
2. Perlunya peningkatan efisiensi produksi pangan di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara, termasuk melalui penguatan sarana dan prasarana produksi.
3. Perlu didorong penggunaan PIHPS untuk pemantauan harga komoditas sebagai langkah dalam menjaga stabilitas harga.
4. Perlunya dorongan terhadap hilirisasi produk pertanian untuk meningkatkan nilai tambah dan daya simpan produk.
5. Pentingnya optimalisasi kios SPHP BULOG sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas harga.
6. Perbaikan infrastruktur dan perluasan jaringan irigasi yang mendukung pertanian di daerah sentra produksi pangan Sulawesi Tenggara.
7. Perlu dilakukan evaluasi ulang terhadap tata niaga komoditas strategis di Sulawesi Tenggara untuk menentukan skema kerjasama antar daerah di masa
8. Perlunya menjaga komunikasi kebijakan yang intensif guna mempertahankan ekspektasi inflasi masyarakat.
9. Pentingnya penyelarasan program kerja antara pemerintah pusat dan daerah untuk mengendalikan inflasi.
10. Perlunya pemantauan secara berkala untuk mengidentifikasi pasokan dan harga komoditas strategis.
11. Perlu dilakukan pendampingan intensif kepada nelayan atau petani untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas komoditas.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

I. REKOMENDASI KEBIJAKAN

Beberapa rekomendasi pengendalian inflasi berdasarkan 4K sebagai berikut:

K1: Ketersediaan Pasokan

- Memanfaatkan momentum panen raya bulan April – Mei 2024 untuk memperkuat stok kebutuhan beras daerah, terutama untuk memenuhi kebutuhan pada musim tanam hingga musim panen berikutnya yang diperkirakan akan terjadi di bulan Oktober.
 - Pemetaan daerah rawan bencana banjir pada daerah produksi berkoordinasi dengan BMKG dan BPBD, potensi dampaknya terhadap pertanian (perkiraan jumlah lahan terdampak dalam berbagai skenario banjir) serta penyiapan penanggulangannya, seperti penyiapan sarana pompanisasi dan berkoordinasi dengan BSIP untuk penyediaan varietas bibit tahan banjir seperti varietas Inpari 29, dan Inpari 30.
4. ◦ Akselerasi anggaran pemerintah untuk pengendalian inflasi seperti BTT, Insentif

Fiskal Pengendalian Inflasi untuk Kabupaten/Kota yang menerima. Pemanfaatan BTT dapat digunakan saat terdapat indikasi kenaikan harga di atas kewajaran, pasokan defisit di luar perkiraan, atau kondisi mendesak lainnya dan dapat direalisasikan untuk menjaga keterjangkauan harga melalui subsidi ongkos angkut. Sedangkan anggaran insentif fiskal dapat digunakan untuk penyerapan cadangan pangan pemerintah dengan melakukan pembelian komoditas langsung dari petani, pembangunan prasarana pendukung pertanian seperti jaringan irigasi usaha tani, serta dukungan asuransi petani.

- Rekomendasi pengalokasian dana desa kepada seluruh kabupaten di Sulawesi Tenggara utamanya daerah sentra produksi dalam rangka program peningkatan produktivitas tanaman pangan seperti pengadaan alsintan, peningkatan ketersediaan dan akses benih dan bibit tanaman, dan Fasilitasi BUMDes dan Lembaga ekonomi lainnya di Desa dalam peran sebagai agregator untuk membeli komoditas produksi Desa untuk dijual kembali di pasar yang lebih luas.
- Segera merealisasikan Kerja sama Antar Daerah (KAD) untuk komoditas yang memiliki stok terbatas dan harga fluktuatif dengan berbasiskan *Early Warning System* (EWS) berdasarkan neraca pangan dan prognosa produksi Kabupaten/Kota selama setahun.

K2: Keterjangkauan Harga

- Menyatukan enumerator SP2KP dan Panel harga untuk menjaga kualitas data dan mempermudah *monitoring* serta evaluasi oleh OPD terkait serta melakukan pembekalan komprehensif oleh BPS sebagai pembinaan data
- Pendirian kios/lapak pantau dan penyeimbang pengendalian inflasi di pasar yang berpengaruh besar terhadap harga-harga komoditas secara umum yang dapat diawasi langsung oleh TPID dan satgas pangan.
- Melakukan Gerakan Pasar Murah yang terintegratif dan rapi yang berkesinambungan dan menghindari kerumunan dan antrean yang Panjang untuk mencegah publikasi negatif terutama seminggu sebelum dan setelah HBKN Idul Fitri terutama di titik-titik yang mendekat dengan lokasi Pasar obyek survei harga BPS.
- Mengoptimalkan fasilitas yang disediakan oleh Bulog berupa program pelaksanaan pasar murah SPHP di Kantor Kelurahan yang dapat dilakukandengan melakukan pengajuan kebutuhan beras (didukung dengan informasi data jumlah KK penerima program) oleh Pemda kepada Bulog. Untuk itu perlu dilakukan himbauan kepada seluruh Kabupaten/Kota utamanya Kabupaten/Kota IHK untuk dapat berkoordinasi dengan Bulog terkait dengan program pasar murah di kantor kelurahan.
- Akselerasi realisasi anggaran dekonsentrasi BAPANAS untuk melaksanakan Gerakan Pangan Murah, realisasi fasilitasi distribusi pangan, dan koordinasi dalam rangka *monitoring* pasokan dan harga di pasar.
- Pemantauan dan penegakan aturan batas harga angkutan

K3: Kelancaran Distribusi

- Koordinasi dengan Pelabuhan untuk menjamin kelancaran bongkar muat barang dan jasa khususnya kebutuhan pokok strategis dan penting di tengah keramaian

penumpang saat periode mudik.

- Bersama satgas pangan untuk terus memonitor dan menjaga kelancaran distribusi komoditas strategis sepanjang periode HBKN Idul Fitri.

K4: Komunikasi Efektif

- Melakukan publikasi (*press release*) yang dilakukan secara bersama-sama secara rutin untuk mengantisipasi ekspektasi inflasi masyarakat dengan penyampaian informasi sesuai dengan kewenangan OPD/KL.
- Publikasi *outlet* untuk pembelian beras premium terpilih disertai dengan diseminasi informasi lokasi dan harga secara terus menerus melalui media masa maupun media sosial yang dimiliki oleh OPD.
- Menggencarkan sosialisasi pelonggaran HET beras sebesar Rp 1.000,-/Kg hingga 24 April 2024 pada toko ritel sehingga pasokan dan penjualan di toko ritel dapat lebih optimal dan harga di pasar tradisional yang saat ini lebih tinggi Rp 2.000,-/Kg dari HET dapat terpengaruh.